

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Triwulan terakhir tahun 2021 ditandai dengan mulai meningkatnya harga barang dan jasa pada hampir semua komoditas. Berdasarkan pemantauan di lapangan bahkan produk tertentu seperti minyak goreng mulai sulit ditemukan. Harga 4 jenis cabe mengalami peningkatan harga yang paling tinggi, dan khususnya cabe rawit kembali mencapai harga 100 ribu bahkan lebih di akhir tahun. Di akhir tahun pula, harga minyak goreng kemasan kembali meningkat tajam ke harga 20 sampai 25 ribu per liter, dan 40 sampai 48 ribu per 2 liter. Sebaliknya, harga bawang merah malah turun di akhir tahun. Namun demikian, barang pokok lainnya tetap tersedia dan lancar distribusinya sampai ke tangan konsumen, kecuali minyak goreng.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Tantangan di triwulan keempat bukan hanya berupa mengendalikan harga dan inflasi saja, tetapi juga upaya pemulihan ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat, termasuk para pelaku usaha. Dengan masih berfluktuasinya kondisi ekonomi akibat pandemic, pemerintah daerah juga mendorong upaya membantu para pelaku ekonomi dan UMKM secara umum yang sangat terimbas dengan menurunnya daya beli masyarakat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan himbauan kepada seluruh ASN yang mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan / tunjangan kinerja baik yang berdomisili di Bandung Barat ataupun di luar agar melakukan pembelian produk-produk UMKM baik di sektor pertanian, industri kecil, perdagangan, jasa dan lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pembelian ini berjumlah minimal 5 persen dari TPP dan harus disertai struk pembelian yang nantinya menjadi bahan verifikasi dan persyaratan pengajuan pencairan TPP tersebut. Pemberlakuan sejak Nopember dan pada awalnya masih sedikit pelaku dan bidang usaha yang terlibat dan umumnya sebagian besar berupa barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, sayur mayur, dan sebagainya. Pada bulan berikutnya telah berkembang dan meluas ke seluruh wilayah kecamatan dan bidang usaha juga bertambah. Pemda bahkan memfasilitasi kegiatan Pasar UMKM untuk mempertemukan para pelaku usaha dengan konsumen yang dalam hal ini para ASN KBB. Salah satu peserta adalah para asosiasi petani tanaman hias, petani bibit anggur dan tanaman impor, dan sebagainya, artinya memperluas pilihan kepada konsumen disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Setelah berjalan selama 2 bulan terakhir di Nopember dan Desember 2021, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bermaksud akan melanjutkan program pemulihan dan penguatan pelaku UMKM ini pada tahun 2021 sebagai bentuk dukungan penguatan daya beli mereka. Tetapi tetap dilakukan evaluasi bagaimana bentuk dan mekanismenya, apakah masih menggunakan system seperti yang ada saat ini atautkah akan ada perubahan dan peningkatan program termasuk besaran persentase belanja.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Daerah melalui OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Perikanan dan Peternakan diminta untuk memonitor perkembangan produksi di tingkat

petani dan peternak apalagi persiapan menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan. Dinas Perindag juga diminta untuk terus melakukan pemantauan perkembangan harga dan pasokan barang di seluruh pasar di seluruh wilayah Kabupaten. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga diminta untuk memonitor kegiatan pelaku industri pariwisata yang menjadi andalan perekonomian Kabupaten Bandung Barat guna menghindari usaha tersebut ditutup.